

## PENGARUH OPINI AUDIT, TINGKAT KEKAYAAN DAERAH, DANA PERIMBANGAN, BELANJA DAERAH DAN UKURAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2016-2021

Salawati <sup>1</sup>, Muhammad Nabawi <sup>2</sup>, Muhammad Lutfi <sup>3</sup>, Siti Maisarah <sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lhokseumawe

[salawaty@stie-lhokseumawe.ac.id](mailto:salawaty@stie-lhokseumawe.ac.id) <sup>1</sup>, [m\\_nabawi23@gmail.com](mailto:m_nabawi23@gmail.com) <sup>2</sup>, [m.lutfi@stie-lhokseumawe.ac.id](mailto:m.lutfi@stie-lhokseumawe.ac.id) <sup>3</sup>, [sitimaisarah@stie-lhokseumawe.ac.id](mailto:sitimaisarah@stie-lhokseumawe.ac.id) <sup>4</sup>,

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh opini audit, tingkat kekayaan daerah, dana perimbangan, belanja daerah dan ukuran Pemerintah Daerah secara simultan terhadap kinerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2016-2021. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder runtun waktu (time series). Metode analisis data yaitu dengan menggunakan uji persamaan regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; Opini audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe tahun 2016-2021. Tingkat kekayaan daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe tahun 2016-2021. Dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe tahun 2016-2021. Belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe tahun 2016-2021. Ukuran Pemerintah Daerah tidak berpengaruh negatif terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe tahun 2016-2021. Secara simultan opini audit, tingkat kekayaan daerah, dana perimbangan, belanja daerah dan ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe tahun 2016-2021. Opini audit, tingkat kekayaan daerah, dana perimbangan, belanja daerah dan ukuran Pemerintah Daerah memiliki kemampuan dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe tahun 2016-2021 sebesar 82,4%. Sisanya 17,6% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini. seperti tingkat kemandirian daerah, status daerah, pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain

**Kata Kunci:** Opini Audit, Tingkat Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Kinerja Pemerintah

### Abstract

This study aims to examine the effect of audit opinion, level of regional wealth, balancing funds, regional expenditure and the size of the Regional Government simultaneously on the performance of the Kota Lhokseumawe Government in 2016-2021. The data used in this study is secondary data time series (time series). The method of data analysis is using multiple linear regression equation test with the help of SPSS program. The results showed that; Audit opinion has a significant effect on the performance of the Kota Lhokseumawe Government in 2016-2021. The level of regional wealth has a negative effect on the performance of the Kota Lhokseumawe Government in 2016-2021. The balancing fund has a negative effect on the performance of the Kota Lhokseumawe

*Government in 2016-2021. Regional spending has a positive and significant effect on the performance of the Kota Lhokseumawe Government in 2016-2021. The size of the Regional Government does not negatively affect the performance of the Local Government of Kota Lhokseumawe in 2016-2021. Simultaneously audit opinion, level of regional wealth, balancing funds, regional expenditure and the size of the Regional Government have a positive effect on the performance of the Regional Government of Kota Lhokseumawe in 2016-2021. Audit opinion, the level of regional wealth, balancing funds, regional expenditures and the size of the Regional Government have the ability to explain their influence on the performance of the Lhokseumawe City Government in 2016-2021 by 82.4%. The remaining 17.6% is influenced by other variables outside this research model. such as the level of regional independence, regional status, regional taxes, regional levies, and others.*

**Keywords:** *Audit Opinion, Level of Regional Wealth, Balancing Funds, Regional Expenditure, Size of The Regional Government, Government Performance*

## **PENDAHULUAN**

Reformasi birokrasi yang terjadi pada tahun 1998 di Indonesia telah membawa perubahan bagi sistem pemerintahan Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi.

Otonomi daerah memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah provinsi, kota, dan kabupaten untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dengan asas otonomi dan tugas pembantuan (UUD 1945). Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan untuk diselenggarakan otonomi seluas-luasnya dalam kerangka Negara kesatuan Republik Indonesia yang salah satunya diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Indonesia memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah daerah untuk menyelenggarakan semua urusan Pemerintah khususnya pada pengelolaan keuangan daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2004 Tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah menjelaskan bahwa setiap Pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah harus mengelola keuangan daerah secara tertib, transparansi dan *akuntable* taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga penyelenggaraan urusan Pemerintah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi efektif dan efisien. Bentuk utama pertanggungjawaban pelaksanaan APBD adalah adanya kewajiban Pemerintah Daerah sebagai pengguna anggaran untuk membuat laporan keuangan dan laporan kinerja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Kinerja Keuangan Pemerintah menjadi salah satu ukuran untuk meninjau kemampuan Pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan

tanggung jawabnya secara baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yakni harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Penerapan sistem akuntansi terhadap keuangan daerah, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2014, laporan keuangan setiap pemerintah daerah setidaknya meliputi; Laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 juga disebutkan bahwa: “Standar akuntansi pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah”. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah dalam Pasal 6 ayat (3) disebutkan bahwa “Sistem akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan keuangan SKPD”. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Aceh dalam Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa “Setiap entitas pelaporan dan entitas akuntansi pada Pemerintah Aceh dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan wajib berpedoman pada kebijakan akuntansi Pemerintah Aceh”.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara menyatakan bahwa pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan (audit) keuangan negara terhadap Pemerintah, hasil pemeriksaan BPK tersebut berupa opini audit. BPK Perwakilan Aceh memeriksa 23 Kabupaten/Kota yang diserahkan masing-masing daerah, salah satunya yaitu Pemerintahan Kota Lhokseumawe. Dalam hal ini Pemerintahan Kota Lhokseumawe tahun 2008-2010 meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tahun 2011-2013 meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), tahun 2014-2015 meraih opini WTP, tahun 2016 meraih opini WDP dan tahun 2017-2018 kembali meraih opini WTP. Dalam hal ini, opini audit mempunyai hubungan yang erat dengan kinerja Pemerintahan Kota Lhokseumawe tahun 2008-2018. Hasil penelitian Sijabat (2016) opini audit berpengaruh negatif terhadap kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Selain opini audit, tingkat kekayaan daerah juga mempunyai hubungan yang erat dengan kinerja Pemerintah Kota Lhokseumawe. Kekayaan daerah menggambarkan tingkat kemakmuran suatu daerah (Setyaningrum, 2012). Sumber kekayaan daerah yang utama yaitu Pendapatan Asli Daerah. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 18 disebutkan bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Mustikarini dan Fitriasari (2012) menyatakan, salah satu sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah berupa PAD. PAD yang tinggi dimiliki oleh pemerintah daerah akan memudahkan kinerja atas transaksi pengeluaran atau belanja daerah sebagai kebutuhan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian Armaja, dkk. (2015) menunjukkan bahwa kekayaan daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan Kabupaten/Kota di Aceh. Selanjutnya dana perimbangan juga mempunyai hubungan yang erat dengan Pemerintah Kota Lhokseumawe. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2014 dalam Pasal 1 angka (14) disebutkan “Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus”. Penelitian Armaja, dkk. (2015) menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan Kabupaten/Kota di Aceh.

Belanja daerah juga mempunyai hubungan yang erat dengan kinerja Pemerintah Kota Lhokseumawe. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2004 Tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah dalam Pasal 1 angka (27) disebutkan bahwa “Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”. Hasil penelitian Armaja, dkk. (2015) menunjukkan bahwa belanja daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan Kabupaten/Kota di Aceh. Disamping itu, ukuran pemerintah daerah yang besar dapat membantu kegiatan operasional pemerintah daerah yang diiringi dengan meningkatnya kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian Febrianto (2018) menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian Achmad (2018) juga menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

Permasalahan yang terjadi terkait kinerja Pemerintah Kota Lhokseumawe antara lain: (a) Tidak setiap tahun Pemerintahan Kota Lhokseumawe menyajikan laporan keuangan tepat waktu; (b) Tidak semua laporan keuangan Pemerintahan Kota Lhokseumawe dapat diakses oleh publik; (c) Tidak semua laporan keuangan dapat diakses pada *website* pemerintahan. Di samping itu, juga terdapat permasalahan antara lain; (d) Penertiban dan pencairan SP2D belum sepenuhnya tertib; (e) Bendahara penerimaan terlambat menyetorkan hasil pungutan Pendapatan Asli Daerah; (f) Pengelolaan investasi jangka panjang belum tertib; (g) Terdapat aset tanah yang belum bersertifikat; (h) Penganggaran pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Kota Lhokseumawe tidak memadai; dan (i) Tunjangan sertifikasi dan tambahan penghasilan guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) tahun 2014 terlambat dibayarkan oleh Pemerintahan Kota Lhokseumawe (Kompas, 2016). Berdasarkan uraian-uraian di atas, peneliti ingin melakukan penelitian dengan meneliti masalah sebagai berikut:

1. Apakah opini audit berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2016-2021.

2. Apakah tingkat kekayaan daerah berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2016-2021.
3. Apakah dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2016-2021.
4. Apakah belanja daerah berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2016-2021.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah pengaruh opini audit, tingkat kekayaan daerah, dana perimbangan, belanja daerah dan ukuran Pemerintah Daerah terhadap kinerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2016-2021. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari empat komponen yaitu neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan dan LAKIP.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kota Lhokseumawe tahun 2016-2021. Pengambilan sampel dengan menggunakan metode sensus, yakni seluruh populasi dijadikan sebagai sampel. Adapun jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 6 tahun atau 24 kwartalan (data).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder berbentuk dokumen yang mana data tersebut adalah data runtut waktu (*time series*) berupa laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe tahun 2016-2021. Penelitian ini dibatasi dengan menganalisis data sekunder kuantitatif tahunan pada rentang waktu antara tahun 2016-2021 dengan pertimbangan ketersediaan data. Adapun sumber data diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe Dalam Angka tahun 2016-2021.

Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi didasarkan pada data historis berupa data sekunder melalui data laporan keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe periode 2016-2021. Semua data yang dikumpulkan dan teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian terlebih dahulu diperiksa. Setelah proses tersebut, kemudian memilah dan memilih data sehingga menghasilkan data yang lengkap dan sempurna, jelas, mudah dibaca dan konsisten. Operasionalisasi variabel penelitian adalah sebagai dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

**Table 1**  
**Operasionalisasi Variabel**

No	Variabel	Definisi	Alat Ukur	Skala
1	Opini audit ( $X_1$ )	Opini audit yaitu suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diberi nilai 5.</li> <li>2. Opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraph Penjelasan (WTP DPP) diberi nilai 4.</li> </ol>	Ordinal

		keuangan (Agoes, 2011:3)	3. Opini Wajar Dengan Pengecua-lian (WDP) diberi nilai 3. 4. Opini Tidak Wajar (TW) ) diberi nilai 2. 5. Opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) diberi nilai 1. <b>(Andani, 2019:120)</b>	
2	Tingkat kekayaan daerah  (X <sub>2</sub> )	Kekayaan adalah kemampuan dalam mencukupi kebutuhan (Mustikarini dan Fitriasari, 2012).	$TKD = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}}$  TKD: Tingkat Kekayaan Daerah  <b>(Mustkarini, 2012)</b>	Rasio
3	Dana Perimbangan (X <sub>3</sub> )	Dana Perimbangan yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.  (Pasal 1 ayat 19 UU No. 33 Tahun 2004)	Dana perimbangan = Dana Bagi Hasil + Dana Alokasi Umum + Dana Alokasi Khusus  <b>(UU No. 32 Tahun 2004)</b>	Rasio
4	Belanja Daerah  (X <sub>4</sub> )	Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih (Pasal 1 Angka 27 PP No.58/2005)	Belanja Daerah = Belanja Langsung + Belanja Tidak Langsung.  (Total Belanja Daerah)  <b>(UU No. 32 Tahun 2004)</b>	Rasio
	Ukuran Pemerintah Daerah  (X <sub>5</sub> )	Ukuran pemerintah daerah adalah ukuran yang diukur berdasarkan <i>total asset</i> yang dimiliki oleh pemerintah daerah (PP No.71 Tahun 2010).	UPD = Total Aset  UPD : Ukuran Pemerintah Daerah  <b>(Damanpour dalam Andani, 2019:120).</b>	Rasio
5	Kinerja Pemerintah  (Y)	Kinerja pemerintah daerah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/ kebijaksanaan dalam	$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan} \times 100}{\text{Realisasi Anggaran}}$  <b>(Mahmudi, 2019:86)</b>	Rasio

		mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (Wiguna, 2015)	
--	--	---	--

### Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh opini audit, tingkat kekayaan daerah, dana perimbangan, belanja daerah dan ukuran Pemerintah Daerah terhadap kinerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2016-2021 yaitu metode analisis data kuantitatif. Metode analisis data kuantitatif adalah metode analisis data yang menggunakan perhitungan angka-angka yang nantinya akan dipergunakan untuk mengambil suatu keputusan di dalam memecahkan masalah. Sedangkan alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Adapun bentuk formula regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$K = \alpha + \beta_1 OA + \beta_2 TKD + \beta_3 Ln.DP + \beta_4 Ln.BD + \beta_5 UPD + \varepsilon$$

Keterangan:

K = Kinerja Pemerintah

$\alpha$  = Konstanta

$\beta_1 - \beta_5$  = Koefisien regresi masing-masing variabel

OA = Opini Audit

TKD = Tingkat Kekayaan Daerah

Ln.DP = Logaritma Natural Dana perimbangan

Ln.BD = Logaritma Natural Belanja daerah

UPD = Ukuran Pemerintah Daerah.

$e$  = *Standar error*

### Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji-t dan uji F-Statistik statistik yaitu untuk mengetahui pengaruh opini audit, tingkat kekayaan daerah, dana perimbangan, belanja daerah dan ukuran Pemerintah Daerah terhadap kinerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2016-2021.

#### *Uji Parsial (Uji t)*

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas yaitu opini audit, tingkat kekayaan daerah, dana perimbangan, belanja daerah dan ukuran Pemerintah Daerah secara sendiri-sendiri mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat (kinerja Pemerintah). Perumusan hipotesis yaitu sebagai berikut:

$H_0$ 1: Apabila  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak berarti opini audit tidak berpengaruh secara parsial terhadap kinerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2016-2021.

- H<sub>a1</sub>: Apabila  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka H<sub>0</sub> ditolaka dan H<sub>a</sub> diterima, artinya opini audit berpengaruh secara parsial terhadap kinerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2016-2021.
- H<sub>02</sub>: Apabila  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka H<sub>0</sub> diterima dan H<sub>a</sub> ditolak berarti tingkat kekayaan daerah tidak berpengaruh secara parsial terhadap kinerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2016-2021.
- H<sub>a2</sub>: Apabila  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka H<sub>0</sub> ditolaka dan H<sub>a</sub> diterima, artinya tingkat kekayaan daerah berpengaruh secara parsial terhadap kinerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2016-2021.
- H<sub>03</sub>: Apabila  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka H<sub>0</sub> diterima dan H<sub>a</sub> ditolak berarti dana perimbangan tidak berpengaruh secara parsial terhadap kinerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2016-2021.
- H<sub>a3</sub>: Apabila  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka H<sub>0</sub> ditolaka dan H<sub>a</sub> diterima, artinya dana perimbangan berpengaruh secara parsial terhadap kinerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2016-2021.
- H<sub>04</sub>: Apabila  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka H<sub>0</sub> diterima dan H<sub>a</sub> ditolak berarti belanja daerah tidak berpengaruh secara parsial terhadap kinerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2016-2021.
- H<sub>a4</sub>: Apabila  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka H<sub>0</sub> ditolaka dan H<sub>a</sub> diterima, artinya belanja daerah berpengaruh secara parsial terhadap kinerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2016-2021.
- H<sub>05</sub>: Apabila  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka H<sub>0</sub> diterima dan H<sub>a</sub> ditolak berarti ukuran Pemerintah Daerah tidak berpengaruh secara parsial terhadap kinerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2016-2021.
- H<sub>a5</sub>: Apabila  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka H<sub>0</sub> ditolaka dan H<sub>a</sub> diterima, artinya ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh secara parsial terhadap kinerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2016-2021.

### ***Uji Simultan (Uji F)***

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara serempak atau bersama-sama terhadap variabel terikat dengan tingkat signifikansi yang digunakan yaitu 5%. Adapun kriteria pengujian untuk uji simultan (uji F) adalah sebagai berikut:

- Apabila  $F_{hitung} < F_{tabel}$ , maka H<sub>0</sub> diterima dan H<sub>a</sub> ditolak yang berarti opini audit, tingkat kekayaan daerah, dana perimbangan, belanja daerah dan ukuran Pemerintah Daerah tidak berpengaruh secara simultan terhadap kinerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2016-2021.
- Apabila  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>a</sub> diterima, artinya opini audit, tingkat kekayaan daerah, dana perimbangan, belanja daerah dan ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh secara simultan terhadap kinerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2016-2021.

### **Uji Koefisien Korelasi**

Adapun uji korelasi dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 16. Korelasi menyatakan derajat hubungan antara dua variabel tanpa memperhatikan variabel mana yang menjadi peubah. Karena itu



hubungan korelasi belum dapat dikatakan sebagai hubungan sebab akibat. Dalam penelitian ini digunakan korelasi *Rank Spearman*. Rumus Korelasi *Rank Spearman* menurut Sugiyono (2018:184) adalah sebagai berikut:

$$\rho = 1 - \frac{6 \sum b_i^2}{n(n^2 - 1)}$$

Keterangan:  $\rho$  = korelasi *rank spearman*

$b_i^2$  = selisih antara X dan Y

n = jumlah sampel yang diambil.

### Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) dilakukan untuk melihat besar variasi dari variabel independen secara bersama-sama dalam mempengaruhi variabel dengan dependen dengan menggunakan rumus :

$$R^2 = \frac{JK_x}{JK_y}$$

Dimana:  $JK_x$  : Jumlah kuadrat regresi (*explained sum of square*).

$JK_y$  : Jumlah total kuadrat (*total sum of square*).

Nilai  $R^2$  berada antara 0 dan 1. Semakin mendekati nilai 1 atau 100%, maka semakin besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

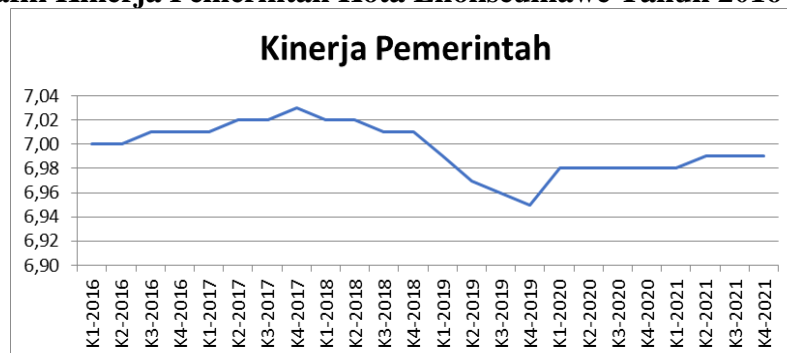
## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kinerja Pemerintah

Kinerja Pemerintah diukur dengan membandingkan realisasi pendapatan dengan realisasi anggaran dikali 100%. Kinerja Pemerintah Kota Lhokseumawe mengalami fluktuasi. Selama tahun 2016-2020 kinerja Pemerintah Kota Lhokseumawe tertinggi yaitu pada kwartalan keempat tahun 2017 dan kinerja Pemerintah Kota Lhokseumawe yang paling rendah terjadi pada kwartalan keempat tahun 2019. Hal ini sebagaimana terlihat pada gambar grafik di bawah ini.

Gambar 1

Grafik Kinerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2016-2021

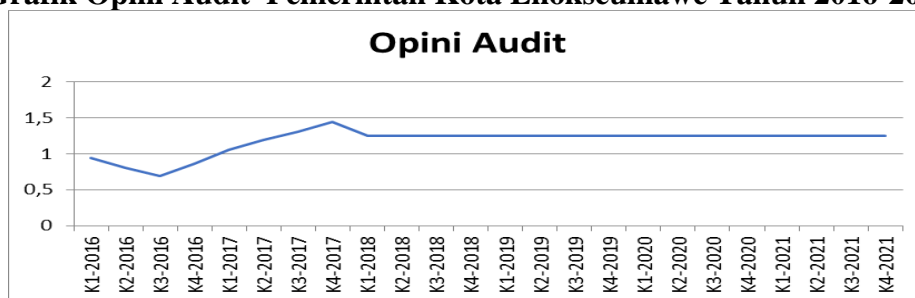


### Opini Audit (X<sub>1</sub>)

Opini audit merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diberi nilai 5, Opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraph Penjelasan (WTP DPP) diberi nilai 4, Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) diberi nilai 3, Opini Tidak Wajar (TW) ) diberi nilai 2, dan Opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) diberi nilai 1. Adapun opini audit pada laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe seperti pada gambar 2 dibawah ini.

Gambar 2

Grafik Opini Audit Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2016-2021



Sumber: Data Diolah 2022

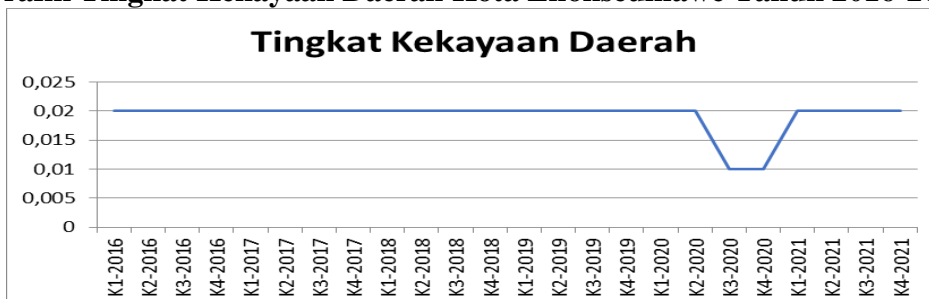
Berdasarkan data di atas, terlihat opini audit Kota Lhokseumawe tahun 2016 mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Tahun 2017-2021 Pemerintah Kota Lhokseumawe mampu meningkatkan kinerja keuangan sehingga memperoleh WTP secara berturut-turut.

### Tingkat Kekayaan Daerah (X<sub>2</sub>)

Dalam penelitian ini, tingkat kekayaan daerah yaitu membandingkan Pendapatan Asli daerah dengan total penerimaan daerah. Tingkat kekayaan daerah Kota Lhokseumawe mengalami fluktuasi. Tahun 2016-2020 tingkat kekayaan daerah Kota Lhokseumawe cenderung stabil, namun kuartalan ketiga dan keempat tahun 2020 mengalami penurunan dan tahun 2021 kembali meningkat. Hal ini sebagaimana terlihat pada gambar grafik di bawah ini.

Gambar 3

Grafik Tingkat Kekayaan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2016-2021



Sumber: Data Diolah 2022

### Dana Perimbangan (X<sub>3</sub>)

Dana perimbangan ini merupakan hasil kebijakan pemerintah pusat dibidang desentralisasi fiskal demi keseimbangan fiskal antara pusat dan daerah, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (pajak dan sumber daya alam) dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana ini dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah.

**Gambar 4**  
**Grafik Dana Perimbangan Kota Lhokseumawe Tahun 2016-2021**



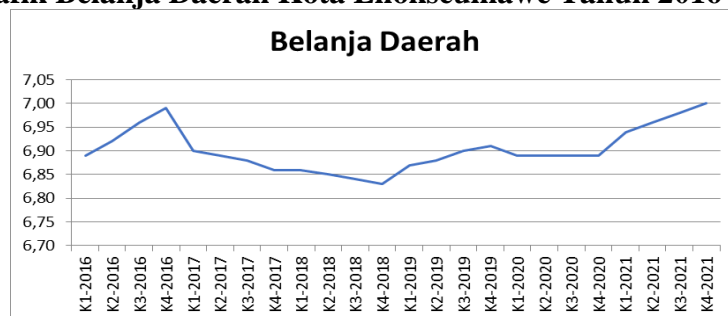
Sumber: Data Diolah 2022

Berdasarkan data di atas, terlihat dana perimbangan Kota Lhokseumawe periode 2016-2021 mengalami fluktuasi. Dana perimbangan terendah terjadi pada kuartalan keempat tahun 2017 dan dana perimbangan tertinggi terjadi pada kuartalan keempat tahun 2016.

### Belanja Daerah (X<sub>4</sub>)

Belanja Daerah, meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Terlihat belanja daerah Kota Lhokseumawe periode 2016-2021 mengalami fluktuasi. Hal ini sebagaimana terlihat pada gambar grafik di bawah ini.

**Gambar 5**  
**Grafik Belanja Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2016-2021**



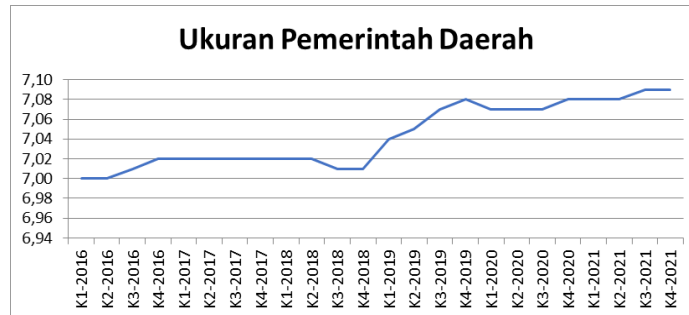
Sumber: Data Diolah 2022

### Ukuran Pemerintah Daerah (X<sub>5</sub>)

Ukuran daerah menunjukkan seberapa besar pemerintah daerah yang salah satunya dapat diukur dari jumlah aset yang dimiliki daerah. Ukuran yang besar dalam pemerintahan akan memberikan kemudahan kegiatan operasional yang

kemudian akan mempermudah dalam memberi pelayanan masyarakat yang memadai. Selain itu, kemudahan di bidang operasional juga akan memberikan kelancaran dalam memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna kemajuan daerah sebagai bukti peningkatan kinerja. Adapun data tentang ukuran pemerintah daerah Kota Lhokseumawe periode 2016-2021 seperti terlihat pada gambar 6 berikut:

**Gambar 6**  
**Grafik Ukuran Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2016-2021**



Sumber: Data Diolah. 2022

Berdasarkan data di atas, dapat dijelaskan bahwa sejak tahun 2016-2021 nilai total aset pada Pemerintahan Kota Lhokseumawe mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat. Total aset tertinggi terjadi pada kuartalan ketiga dan keempat tahun 2021 yaitu sebesar 7,09.

### Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Hasil analisis data mengenai pengaruh opini audit, tingkat kekayaan daerah, dana perimbangan, belanja daerah dan ukuran Pemerintah Daerah terhadap kinerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2016-2021 yang dirumuskan dalam fungsi regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel 1:

**Tabel 1**  
**Hasil Uji Regresi Linear berganda**

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11.812	2.893		4.083	.001
	OA	.109	.042	.920	2.577	.019
	TKD	-1.609	.899	-.218	-1.790	.090
	DP	-.023	.430	-.023	-.053	.959
	BD	.394	.110	.882	3.569	.002
	UPD	-1.062	.141	-1.630	-7.522	.000

a. Dependent Variable: KPPD

Sumber: Data Diolah. 2020

Berdasarkan tabel di atas, maka diperoleh persamaan regresi linear berganda yaitu sebagai berikut:

$$Y = 11,812 + 0,109 - 1,609 - 0,023 + 0,394 - 1,062$$

Dari persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa:

- Nilai konstanta sebesar 11,812 artinya jika opini audit, tingkat kekayaan daerah, dana perimbangan, belanja daerah dan ukuran Pemerintah Daerah dianggap konstan. maka kinerja Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe tahun 2016-2021 sebesar 11,812.
- Koefisien opini audit ( $X_1$ ) sebesar 0,109. berarti jika opini audit meningkat 1%. maka kinerja Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe tahun 2016-2021 akan meningkat sebesar 0,109.
- Koefisien tingkat kekayaan daerah ( $X_2$ ) sebesar -1,609 berarti jika tingkat kekayaan daerah meningkat 1%. maka kinerja Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe tahun 2016-2021 akan menurun sebesar 1,609.
- Koefisien dana perimbangan ( $X_3$ ) sebesar -0,023 berarti jika dana perimbangan meningkat 1%. maka kinerja Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe tahun 2016-2021 akan menurun sebesar 0,023.
- Koefisien belanja daerah ( $X_4$ ) sebesar 0,394 berarti jika belanja daerah meningkat 1%. maka kinerja Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe tahun 2016-2021 akan meningkat sebesar 0,394.
- Koefisien ukuran Pemerintah Daerah ( $X_5$ ) sebesar -1,062 berarti jika ukuran Pemerintah Daerah meningkat 1%. maka kinerja Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe tahun 2016-2021 akan menurun sebesar 1,062.

## Hasil pengujian Hipotesis

### Hasil Uji *t* Statistik

Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji-t yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial seperti terlihat pada tabel 4.10 di atas dengan tingkat keyakinan 95% ( $\alpha = 0.05$ ) dan nilai  $t_{tabel}$  sebesar  $1,72913 = 1,72$ .

- Opini audit ( $X_1$ ) diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar 2,577 dengan tingkat signifikan sebesar 0,019. nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1,72. Artinya  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $2,577 > 1,72$ . artinya opini audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe tahun 2016-2021.
- Tingkat kekayaan daerah ( $X_2$ ) diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar -1,790 dengan tingkat signifikan sebesar 0,090. Sedangkan nilai  $t_{tabel}$  ditetapkan sebesar 1,72. Dengan demikian  $t_{hitung} < t_{tabel}$  yaitu  $-1,790 < 1,72$  artinya tingkat kekayaan daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe tahun 2016-2021.
- Dana perimbangan ( $X_3$ ) diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar -0,053 dengan tingkat signifikan sebesar 0,959. Sedangkan nilai  $t_{tabel}$  ditetapkan sebesar 1,72. Dengan demikian  $t_{hitung} < t_{tabel}$  yaitu  $-0,053 < 1,72$ . artinya dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe tahun 2016-2021.
- Belanja daerah ( $X_4$ ) diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar 3,569 dengan tingkat signifikan sebesar 0,002. Sedangkan nilai  $t_{tabel}$  ditetapkan sebesar 1,72. Dengan demikian  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $3,569 > 1,72$ . Artinya belanja daerah

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe tahun 2016-2021.

- Ukuran Pemerintah Daerah ( $X_5$ ) diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar -7,522 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000. Sedangkan nilai  $t_{tabel}$  ditetapkan sebesar 1,72. Dengan demikian  $t_{hitung} < t_{tabel}$  yaitu  $-7,522 < 1,72$ . Artinya ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe tahun 2016-2021.

### Hasil Uji F Statistik

Uji F-tes digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat dengan tingkat signifikansi yang digunakan yaitu 5% adalah 2,74. Adapun hasil uji F-tes (uji F) seperti terlihat pada tabel 2 berikut:

**Tabel 2**  
**Hasil Uji F Statistik**

ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.008	5	.002	16.804	.000 <sup>a</sup>
	Residual	.002	18	.000		
	Total	.010	23			

Sumber: Data Diolah. 2022

Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa hasil uji F mengenai pengaruh opini audit, tingkat kekayaan daerah, dana perimbangan, belanja daerah dan ukuran Pemerintah Daerah terhadap kinerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2016-2021 secara bersama-sama diperoleh nilai  $F_{hitung}$  sebesar 16,804. Sedangkan nilai  $F_{tabel}$  dengan tingkat signifikan 5% 2,72. Dengan demikian  $F_{hitung} > F_{tabel}$  yang mana  $F_{hitung}$  16,804 >  $F_{tabel}$  2,72. artinya secara simultan opini audit, tingkat kekayaan daerah, dana perimbangan, belanja daerah dan ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe tahun 2016-2021.

### Hasil Uji Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Analisis koefisien korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan asosiasi (hubungan) linier antara dua variabel. Sedangkan koefisien determinasi ( $R^2$ ) untuk mengukur atau mengetahui seberapa besar perubahan variabel terikat dijelaskan atau ditentukan oleh variabel bebasnya. Adapun hasil koefisien korelasi ( $R$ ) dan koefisien determinasi ( $R^2$ ) mengenai pengaruh opini audit, tingkat kekayaan daerah, dana perimbangan, belanja daerah dan ukuran Pemerintah Daerah terhadap kinerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2016-2021 seperti terlihat pada tabel 3 berikut:

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi**

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.908 <sup>a</sup>	.824	.775	.010

Sumber: Data Diolah. 2022

Berdasarkan hasil penelitian koefisien korelasi (R) sebesar 0,908 (90,8%) artinya opini audit, tingkat kekayaan daerah, dana perimbangan, belanja daerah dan ukuran Pemerintah Daerah mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan kinerja Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe. Koefisien determinasi ( $R^2$ ) (*adjusted R square*) sebesar 0,824 (82,4%) artinya opini audit, tingkat kekayaan daerah, dana perimbangan, belanja daerah dan ukuran Pemerintah Daerah memiliki kemampuan dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe tahun 2016-2021 sebesar 82,4%. Sisanya 17,6% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini. seperti tingkat kemandirian daerah, status daerah, pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain.

## PEMBAHASAN

### *Pengaruh Opini Audit Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe*

Opini audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe tahun 2016-2021. Berpengaruhnya opini audit terhadap kinerja Pemerintah Daerah karena setiap pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan keuangan kepada pemerintah pusat. Sebagai wujud akuntabilitas maka laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tersebut harus diperiksa oleh BPK sebagai pemeriksa eksternal pemerintah. Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD. Salah satu bagian dalam LHP tersebut adalah Laporan Kepatuhan atas Peraturan Perundang-undangan yang menggambarkan ketaatan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atas Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Opini audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe juga disebabkan selama periode tahun 2016-2021 Pemerintah Kota Lhokseumawe memperoleh prestasi yang fluktuatif. Namun Pemerintah Kota Lhokseumawe terus berupaya untuk memperoleh Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Hal ini telah dibuktikan dari tahun tahun 2017-2021. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Sijabat (2016) opini audit berpengaruh negatif terhadap kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Opini audit, tingkat kekayaan daerah, dana perimbangan, belanja daerah dan ukuran Pemerintah Daerah mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe. Opini audit, tingkat kekayaan daerah, dana perimbangan, belanja daerah dan ukuran Pemerintah Daerah memiliki kemampuan dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe tahun 2016-2021 sebesar

82,4%. Sisanya 17,6% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini. seperti tingkat kemandirian daerah, status daerah, pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain.

### ***Pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe***

Tingkat kekayaan daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe tahun 2016-2021. Hal ini terjadi karena tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe terhadap pemerintah Pusat masih tinggi. Ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana pemerintah pusat menunjukkan tingkat kemandirian yang masih rendah. Rendahnya tingkat kemandirian menggambarkan masih rendahnya kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah dalam membiayai program dan kegiatan operasionalnya masih sangat bergantung pada sumber dana dari pihak eksternal. Kinerja keuangan juga menjadi sorotan dari masyarakat terutama yang terkait dengan pelayanan publik yang dapat mempengaruhi kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe. Ketergantungan pemerintah daerah Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe pada dana perimbangan juga menyebabkan pemerintah daerah sangat kurang mampu menyediakan dana untuk membiayai pembangunan daerah. Ketika APBD terlalu mengandalkan dana perimbangan. maka perkiraan belanja dapat meleset. karena penerimaan pendapatannya berubah-ubah yang mungkin salah satunya diakibatkan oleh penundaan pencairan Dana Alokasi Umum (DAU). Sehingga akan mengakibatkan pemotongan anggaran dan mengganggu kinerja pemerintah daerah tersebut. Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian Armaja, dkk. (2015) menunjukkan bahwa kekayaan daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan Kabupaten/Kota di Aceh.

### ***Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe***

Dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe tahun 2016-2021. Hal ini terjadi karena tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe terhadap pemerintah Pusat masih tinggi. Ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana pemerintah pusat menunjukkan tingkat kemandirian yang masih rendah. Rendahnya tingkat kemandirian menggambarkan masih rendahnya kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah dalam membiayai program dan kegiatan operasionalnya masih sangat bergantung pada sumber dana dari pihak eksternal. Kinerja keuangan juga menjadi sorotan dari masyarakat terutama yang terkait dengan pelayanan publik yang dapat mempengaruhi kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe.

Ketergantungan pemerintah daerah Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe pada dana perimbangan juga menyebabkan pemerintah daerah sangat kurang mampu menyediakan dana untuk membiayai pembangunan daerah. Ketika APBD terlalu mengandalkan dana perimbangan. maka perkiraan belanja dapat meleset. karena penerimaan pendapatannya berubah-ubah



yang mungkin salah satunya diakibatkan oleh penundaan pencairan Dana Alokasi Umum (DAU). Sehingga akan mengakibatkan pemotongan anggaran dan mengganggu kinerja pemerintah daerah tersebut.

Semakin tinggi tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat maka semakin tinggi skor kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe. Tingkat ketergantungan dengan pusat memiliki pengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Sebab semakin besarnya penerimaan DAU oleh satu daerah maka Pemerintah akan lebih memantau pelaksanaan dari alokasi DAU dibanding dengan daerah yang lebih sedikit penerimaannya. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Armaja, dkk. (2015) menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan Kabupaten/Kota di Aceh.

### ***Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe***

Belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe tahun 2016-2021. Hal ini disebabkan pemerintah Kota Lhokseumawe kurang membelanjakan modal untuk membeli aset-aset yang dapat meningkatkan pendapatan dan untuk perolehan aset lainnya yang kurang memberikan manfaat lebih bagi daerah Kota Lhokseumawe. Disamping itu semakin banyak belanja modal, maka semakin rendah pula produktivitas perekonomian dalam hal ini adalah kinerja pemerintah daerah.

Belanja daerah sangat erat kaitannya dengan investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Lhokseumawe. Belanja daerah yang besar merupakan cerminan dari banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun. Hal ini menandakan bahwa semakin banyak pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Lhokseumawe untuk masyarakatnya semakin meningkat juga pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat sehingga kinerja daerah akan lebih baik. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Armaja, dkk. (2015) menunjukkan bahwa belanja daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan Kabupaten/Kota di Aceh.

### ***Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe***

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe. Tidak berpengaruh ukuran pemerintah daerah, dalam hal ini dilihat dari ukuran pemerintah daerah yang merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Ukuran pemerintah daerah Kota Lhokseumawe yang kecil sangat mempengaruhi PAD setiap tahunnya baik dari sumber pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, zakat, infaq dan sedekah serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah serta sumber daya lainnya. Disamping total aset yang dimiliki, ukuran pemerintah daerah juga dipengaruhi oleh pegawai dan produktivitas yang besar. Pemerintah daerah Kota Lhokseumawe dengan ukuran yang kecil kurang

memiliki tekanan yang besar untuk melakukan pelayanan yang baik kepada masyarakat serta pengungkapan atas laporan kinerjanya dan masih kurangnya aset yang dimiliki untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hasil penelitian ini tidak mendukung Hasil penelitian Achmad (2018) juga menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pengolahan data dan hasil analisis data yang mengacu pada masalah dan tujuan penelitian. maka dapat dirumuskan kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Opini audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe tahun 2016-2021.
2. Tingkat kekayaan daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe tahun 2016-2021.
3. Dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe tahun 2016-2021.
4. Belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe tahun 2016-2021.
5. Ukuran Pemerintah Daerah tidak berpengaruh negatif terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe tahun 2016-2021.
6. Secara simultan opini audit, tingkat kekayaan daerah, dana perimbangan, belanja daerah dan ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe tahun 2016-2021.
7. Opini audit, tingkat kekayaan daerah, dana perimbangan, belanja daerah dan ukuran Pemerintah Daerah memiliki kemampuan dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe tahun 2016-2021 sebesar 82,4%. Sisanya 17,6% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini. seperti tingkat kemandirian daerah, status daerah, pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain.

### **Saran**

Berdasarkan hasil yang diperoleh di atas. dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Kota Lhokseumawe diharapkan untuk dapat meningkatkan kinerjanya agar opini audit kedepannya semakin baik dan meningkatkan pendapatan asli daerah agar tingkat kekekayaan daerah lebih maksimal.
2. Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan dan menambah variabel lainnya yang akan digunakan sebagai variabel yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah sehingga diperoleh hasil yang lebih signifikan

## REFERENSI

- Achmad. (2018). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Jumlah SKPD, Umur Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2012-2014. *Jurnal Akuntansi*.
- Febrianto, Nova. (2018). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, Ukuran Legislatif, dan *Intergovernmental Revenue* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten dan Kota Di Provinsi D.I.Y Tahun 2009 -2016. Skripsi Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Mustikarini, Widya Astuti dan Debby Fitriyasari. (2012). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007. Simposium Nasional Akuntansi XV. Banjarmasin.
- Setyaningrum, D. dan F. Syafitri. (2012). Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. Vol. 9 No.2.
- Sijabat. (2016). Pengaruh Opini, Temuan Audit, Kemandirian dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Di Indonesia Tahun 2010-2014. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Keuangan Negara.